

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
SD NURUL HUDA II SURABAYA DITINJAU DARI PSAK NO.1
(PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN)**

Nur Fadilah

email: nurfadilah06@gmail.com

SD Nurul Huda II Surabaya
Jl. Sencaki 64 Simolawang Simokerto Surabaya

Article History:

Dikirim:

.....

Direvisi:

.....

Diterima:

.....

Korespondensi Penulis:

HP / WA

Abstract: Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi suatu entitas yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan antara penyajian laporan keuangan pada laporan keuangan SD Nurul Huda II dengan laporan keuangan yang sesuai PSAK No.1. metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan teori yang terdapat pada PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan pada SD Nurul Huda II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan SD Nurul Huda II menyajikan laporan keuangan sesuai aturan dan cara yang telah berlaku di Yayasan Nurul Huda. Yaitu terdiri dari waktu dan komponen pembuatan laporan keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang ada di SD Nurul Huda II tidak sesuai dengan PSAK No.1 (penyajian laporan keuangan)

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Psak No.1

PENDAHULUAN

Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang di maksud adalah staf tata laksana administrasi, staf teknis pendidikan didalamnya ada kepala sekolah dan guru, komite sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus

memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasional sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualis”.¹

Keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Pengelolaan laporan keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.

Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia

¹ Amiamaliahanii, <https://amiamaliahanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaankeuangan-pendidikan/> (diakses 30 November 2018 pukul 14:25)

pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa lagi dalam kondisi krisis pada sekarang ini.²

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula dilembaga pendidikan atau sekolah. Peningkatan kesejahteraan pendidikan bukanlah hal yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui apakah keuangan di lembaga tersebut sudah baik atau tidak.

Dalam akuntansi dikenal adanya standar yang harus dipatuhi dalam pembuatan laporan keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna laporan keuangan. Jika tidak terdapat standar, lembaga dapat saja menyajikan laporan keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Hal ini tentunya akan menjadi masalah bagi para pengguna karena akan menyulitkan untuk memahami laporan keuangan yang ada. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap lembaga atau lembaga dalam membuat laporan keuangan. Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

Adanya fenomena bahwa laporan keuangan yang disusun oleh lembaga tidak sepenuhnya berdasarkan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku, tetapi laporan keuangan pada lembaga hanya mengacu kepada standar dan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya. Begitu juga sebaliknya jika laporan keuangan yang disusun tidak

² blog pendidikan indonesia, <http://inducation.blogspot.com/2008/10/manajeme-keuangan-sekolah.html> (diakses, 30 november 2018 pukul 14:35)

berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta akan menyesatkan penggunaannya.³

Sejalan dengan konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) pada tahun 2009, DSAK-IAI mengeluarkan PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) yang menggantikan PSAK no.1 sebelumnya. PSAK No. 1 (revisi 2009) berlaku efektif 1 januari 2011 dan membawa banyak perubahan pada wajah laporan keuangan perusahaan di Indonesia. PSAK No. 1 dapat diterapkan untuk semua laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan demikian, PSAK No. 1 dapat diterapkan untuk laporan keuangan semua entitas usaha yang disajikan dalam laporan tahunan.

PSAK No. 1 menetapkan seluruh persyaratan yang berguna untuk menyajikan laporan keuangan untuk kebutuhan umum yang menguraikan pedoman untuk strukturnya dan mendasari persyaratan minimum atas isinya dan pengungkapannya.

Tujuan PSAK No. 1 adalah untuk memastikan informasi yang dapat diperbandingkan dengan menyajikan laporan keuangan entitas periode sebelumnya dan dengan menyajikan laporan keuangan entitas lainnya.

PSAK No. 1 menetapkan karakteristik umum untuk penyajian laporan keuangan. Secara khusus, PSAK No. 1 membahas aspek-aspek: penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, kelangsungan usaha (*going concern*), dasar aktual akuntansi, materialitas, agregasi, dan saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian.

Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode. Laporan keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk menjamin para pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan PSAK No.1. Para pemakai laporan keuangan tersebut meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat.⁴

SD Nurul Huda II Surabaya merupakan lembaga pendidikan sekolah dasar yang ada di Sencaki Surabaya. Laporan keuangan yang ada di sekolah tersebut sudah memakai sistem komputerisasi namun belum semua sesuai dengan PSAK No. 1.

³Siti Hawa dan Siti Khairani. (2013). Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan PT.Jamsostek (Persero). *Jurnal. STIE MDP*. Hal.1-2

⁴Marshallino Jordy Wantah. (2015). Analisis Penerapan Psak No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. *Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado*. Hal.75

Dari informasi yang diuraikan diatas, maka peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan SD Nurul Huda Surabaya II Ditinjau Dari PSAK No.1 (Penyajian Laporan Keuangan)”

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam, tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subyek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut.⁵

PEMBAHASAN

Inisari dan kutipan dari beberapa teori yang berhubungan dengan tema penelitian ini, didapatkan laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang biasanya disusun pada akhir periode. Laporan keuangan memiliki tujuan dan manfaat bagi para pemakainya. Laporan keuangan juga terdiri dari unsur-unsur yang nantinya dimasukkan ke dalam komponen-komponen laporan keuangan yang merupakan jenis-jenis laporan yang terdapat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang berguna kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan. Laporan keuangan adalah sebuah sarana bagi entitas untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak eksternal.⁶

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi perusahaan yang terdiri dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang disusun pada akhir periode suatu perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut SFAC No. 8 adalah menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi investor potensial, pemerintah dan kreditor dalam pembuatan keputusan ekonomi, seperti halnya membeli, menjual atau menahan saham dan pemberian kredit kepada entitas.⁷

⁵ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 47

⁶ Kieso, Donald, Jerry Weygandt, dan Terry D., Warfield. 2011. *Intermediate Accounting*. IFRS Edition. Volume 1. New York: John Wiley and Sons Inc. hlm. 5

⁷ Financial Accounting Standards Board. 2010. Statement of Financial Accounting Concepts No. 8. Connecticut: Financial Accounting Foundation. Par .OB2

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Lebih spesifik laporan keuangan dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang terkait dengan peramalan, perbandingan, dan pengevaluasian kekuatan perusahaan.

Unsur-unsur laporan keuangan merupakan bagian-bagian yang terdapat dalam laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu nilai dalam setiap penyusunan laporan yang ada dalam laporan keuangan. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, unsur laporan keuangan terdiri dari dua, yaitu unsur dari posisi keuangan dan unsur dari kinerja. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban.⁸

Berdasarkan pernyataan dari PSAK tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa laporan laba rugi komprehensif adalah suatu laporan yang sistematis yang mengikhtisarkan penghasilan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh oleh suatu entitas selama periode akuntansi.

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, masing-masing pos pendapatan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik seperti prive dan deviden.

Laporan arus kas selama periode, Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2 mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. laporan arus kas merupakan ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu.⁹ Laporan arus kas atau statement of cash flow adalah laporan yang menguraikan arus kas masuk dan keluar menurut kategorinya, dan laporan ini menjelaskan perubahan kas selama suatu periode.¹⁰

⁸Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. Par. 47

⁹Warren, Carl S., James M., Reeve, and Philip E., Fees. 2005. *Pengantar Akuntansi. Edisi 21 Buku Satu. Terjemahan Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 25

¹⁰Dyckman, Thomas R., Ronald E., Dukes, and Charles J., Davis. 2000. *Akuntansi Intermediate. Edisi Ketiga Jilid II. Terjemahan Herman Wibowo*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 547

Standar Akuntansi Keuangan yang lengkap dan komprehensif merupakan dambaan semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Keuangan ini dari waktu ke waktu akan terus dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan praktik bisnis dan profesi akuntansi. Globalisasi perekonomian dunia menyebabkan peningkatan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Selain itu, era reformasi juga menuntut adanya peningkatan transparansi informasi dunia usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Standar Akuntansi Keuangan yang mutakhir dan selalu sesuai dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhinya mutlak diperlukan. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Keuangan yang disempurnakan pada tanggal 1 Juni 1999 lalu, perlu dimutakhirkan kembali agar sejalan dengan perkembangan dunia usaha dan era reformasi saat ini.

Kebijakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam pemutakhiran standar akuntansi Keuangan saat ini, didasarkan pada tiga hal berikut : Pertama, mendukung program harmonisasi yang diprakarsai oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC) dengan selalu mengharmonisasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan *International Accounting Standards*.

Kedua, dalam perumusan standar akuntansi keuangan, disamping menggunakan *IAS* sebagai acuan, juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia. Ketiga, pengembangan suatu standar akuntansi yang didasarkan pada tuntutan perkembangan dunia usaha di Indonesia yang belum diatur dalam *IAS* dilakukan dengan berpedoman pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kondisi lingkungan usaha di Indonesia, dan standar akuntansi yang berlaku dinegara lain.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan hingga saat ini telah mengembangkan dan menyempurnakan standar akuntansi keuangan yang ada. Hasil pengembangan standar akuntansi keuangan yang dilakukan oleh DSAK mulai September 1998 hingga April 2002 ada dua hal. Pertama, menerbitkan empat PSAK revisi,¹¹ Kedua, menerbitkan tiga PSAK baru.¹²

¹¹ PSAK 55 (revisi 1999) tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai merevisi PSAK 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai., PSAK 31 (revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen merevisi PSAK 5 tentang Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen. dan , PSAK 19 (revisi 2000) tentang Aktiva Tidak Berwujud merevisi : PSAK 19 tentang Aktiva Tak berwujud, PSAK 6 tentang Akuntansi dan Pelaporan bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan, pada paragraf yang mengatur pengakuan biaya pada perusahaan dalam tahap pengembangan dan perintisan usaha, PSAK 17 tentang Akuntansi Penyusutan, pada bagian yang mengatur amortisasi (penyusutan) aktiva tidak berwujud, PSAK 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan.

¹² PSAK 56 tentang Laba Per Saham. PSAK 57 tentang Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aktiva Kontinjensi merevisi PSAK 8 tentang Kontinjensi dan Peristiwa setelah tanggal neraca, pada bagian yang mengatur mengenai kontinjensi. PSAK 58 tentang Operasi dalam Penghentian. Pemahaman dan dapat dibandingkannya laporan keuangan perusahaan atau lembaga sekolah akan semakin meningkat apabila

Tujuan pernyataan ini adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*generasi purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan perusahaan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam pernyataan standar akuntansi terkait.

Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan untuk untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasi. Pernyataan ini menggunakan terminology yang cocok bagi perusahaan yang berorientasi profit. Organisasi nirlaba dan perusahaan lainnya yang menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya. Pernyataan ini menggantikan PSAK 1 tentang pengungkapan kebijakan akuntansi dan PSAK 9 tentang penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.

Standar Akuntansi dalam Islam

Dalam Quran surat Al-Baqarah: 282-283, dijelaskan tentang dasar akuntansi dalam Islam, dimana dalam Ayat tersebut berkaitan dengan proses catat mencatat (akuntansi) dalam kegiatan bisnis. Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan konsep kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Senada dengan ayat tersebut, Scott menyarankan bahwa keadilan, kebenaran dan kejujuran adalah pernyataan umum yang mengkaitkan aturan dan prosedur akuntansi dengan konsep sosial. Lebih lanjut

laporan keuangan disajikan dalam format yang seragam dan menggunakan deskripsi yang sama untuk pos-pos yang sejenis. Namun demikian dalam kenyataannya keseragaman tersebut mungkin sulit diterapkan bahkan dapat menghalangi perusahaan atau lembaga sekolah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai dengan kondisi masing-masing mutu laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan melalui : Penerapan persyaratan dalam PSAK termasuk persyaratan pengungkapan. Pemberian pedoman struktur laporan keuangan termasuk persyaratan minimum dari setiap komponen utama laporan, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan persyaratan praktis untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan materialitas, kelangsungan usaha, pemilihan kebijakan akuntansi dalam hal tidak ada pengaturan oleh PSAK, konsistensi dan penyajian informasi komparatif.

Scott berpendapat bahwa akuntansi akan berubah karena perubahan kondisi lingkungan tetapi bukan berubah secara arbiter hanya karena dimaksudkan untuk memenuhi tujuan yang menguntungkan pihak tertentu saja¹³.

Pada dasarnya kondisi lingkungan yang sebenarnya menentukan jenis dan isi standar akuntansi. Kebutuhan akan standar akuntansi yang bercirikan Islam merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi Islam. Munculnya kembali pemikiran-pemikiran tentang ekonomi Islam makin meningkatkan persatuan sesama muslim dalam kegiatan politik dan ekonomi dapat dikatakan sebagai kekuatan baru perkembangan ekonomi di negara-negara Islam (termasuk Indonesia).

Perkembangan tersebut mengarah pada penciptaan lingkungan ekonomi dan pasar yang seragam sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya pelaporan keuangan perusahaan di negara-negara Islam akan ditandai dengan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda dengan negara-negara barat. Oleh karena kekuatan tersebut mempengaruhi tujuan dan format pelaporan keuangan, kebutuhan untuk memiliki standar akuntansi yang bernapaskan Islam merupakan suatu keharusan langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun standar akuntansi Islam.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain: Membentuk dan mempraktekan sistem ekonomi Islam sehingga mempengaruhi tujuan laporan keuangan yang berkaitan dengan standar akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan harus mampu meyakinkan pemakai laporan bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kualitas informasi yang dihasilkan relevan dan dapat diuji kebenarannya, tepat waktu dan karakteristik lain seperti yang diterapkan di negara barat yang konsisten dengan tiga hal pokok yaitu: Keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Kriteria pangakuan untuk masing-masing elemen pelaporan keuangan disajikan sesuai dengan syariat Islam.

Wacana Akuntansi Syari'ah walau masih dalam tatanan konsep tapi sudah bisa digunakan untuk berbagai aktivitas ekonomi. Dan seterusnya dapat menjadi tatanan yang lebih praktis.¹⁴

Sejarah Yayasan Nurul Huda Surabaya

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda adalah Sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang berjarak ± 200 m ke arah timur dari Masjid Agung

¹³Salmonson, R. F., 1969, Basic Financial Accounting Theory, Belmont-California: Wadsworth Publishing Company, Inc.

¹⁴Hardiwinoto, 2006. STANDAR AKUNTANSI SYARIAH (Paradigma Baru Sistem Akuntansi di Indonesia). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Fakultas Ekonomi Semarang*.

Sunan Ampel tepatnya di Jl. Sencaki 64 Surabaya yang kemudian dikenal dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dan telah eksis sampai sekarang selama \pm 10 tahun, berawal dari berdirinya Mushalla (langgar wakaf) Nurul Huda yang dibangun secara swadaya masyarakat pada tahun \pm 1955. Perjuangan panjang tersebut tidak terlepas dari seorang sosok tenang penuh wibawa yang menjadi panutan masyarakat sekitarnya yaitu KH. Ridlwan Baidlowi yang sebelum wafat, beliau adalah seorang imam rawatib di Mushalla Nurul Huda (Langgar Wakaf Nurul Huda).

Alumni dari Jami'atul Imam Muhammad ibn Saud Riyadh – Saudi Arabiah yaitu KH. Abdurrahman Navis, Lc, yang kemudian diberikan amanah untuk menjadi Pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya hingga sekarang. Setelah beliau memegang amanah yang sangat berat ini, beliau mulai merintis dan mengembangkan langgar wakaf ini yang diawali dengan pemugaran dan renovasi total sebuah bangunan yang asalnya adalah tempat tinggal imam rawatib saat itu menjadi bangunan permanen Yayasan Pondok Pesantren Putra berlantai dua. Sebagai upaya untuk menyukseskan rencana besarnya itu, beliau memantapkan barisan bersama Ust. Drs. H. Abdul Hajji Mukhtar yang kemudian menjadi Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren dan Bapak Ali Mustaqim menjadi Wakil Sekretaris serta Ust. H. Hamidin Lumaris Al-Hafidz sebagai Bendahara Yayasan Pondok Pesantren. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda secara resmi berdiri pada tanggal 28 Juli 1994 sesuai dengan akte notaris yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Trining Ariswati, SH dengan nomor 109/1994. Pesantren ini berdiri diatas tanah wakaf dari seorang muhsinin Surabaya yang jauh sebelum yayasan berdiri, telah berdiri sebuah mushalla (langgar wakaf Nurul Huda) yang dibangun dengan swadaya murni masyarakat sekitar. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda adalah lembaga pendidikan keagamaan dan dakwah serta sosial kemasyarakatan telah mengembangkan diri menjadi lembaga profesional dengan beberapa unit dibawahnya, yaitu: Unit Pendidikan dan Jasa di Bawah Yayasan Pondok Pesantren.

Kesesuain Laporan Keuangan SD Nurul Huda Surabaya dengan PSAK No. 1 (Penyajian Laporan Keuangan)

Penyajian laporan keuangan SD Nurul Huda II Surabaya tidak sesuai dengan aturan kebijakan akuntansi yang mengacu pada PSAK No. 1 (penyajian

laporan keuangan), melainkan disusun berdasarkan keputusan bersama pihak yayasan baik ketua yayasan, bendahara, dan pengurus yayasan lainnya. Dimana dalam prakteknya menerapkan prinsip akuntansi anti korupsi, yaitu dengan menerapkan prinsip : Akuntabilitas, Transparansi, Kewajaran, Kebijakan dan Kontrol kebijakan.

Prinsip *Akuntabilitas* yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Prinsip *Transparansi*, salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Prinsip *Kewajaran*, prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip *Kebijakan*, prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Prinsip ini ditujukan agar seseorang dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Prinsip *Kontrol*, kebijakan Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.¹⁵

Seperti yang sudah kita ketahui dalam PSAK No. 1 terdapat lima komponen laporan keuangan, yaitu Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, Laporan perubahan ekuitas selama periode, Laporan arus kas selama periode, Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat

¹⁵ Dr. Taudlikul Afkar, Johan Wahyu Wicaksono, SE, MEI, dan Ani Faujiah, S.Fil.I, MEI, *Mendesain Akuntansi Anti Korupsi*, (Surabaya: STAINIA Press, 2016). Hal. 37-38

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D. Sedangkan di SD Nurul Huda II Surabaya masih menggunakan laporan keuangan sederhana yang didalamnya hanya terdapat 2 komponen yaitu pemasukan dan pengeluaran. Namun disetiap komponen baik pemasukan maupun pengeluaran terdapat beberapa poin yang menjelaskan pemasukan dan pengeluaran tersebut diperoleh dan digunakan untuk apa saja. Dengan kata lain, laporan keuangan SD Nurul Huda II Surabaya masih sangat jauh jika harus dibandingkan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 1 (tentang penyajian laporan keuangan). Namun dengan adanya penelitian ini, diharapkan laporan keuangan yang ada di SD Nurul Huda II Surabaya dapat diperbaiki sedikit demi sedikit agar suatu hari nanti bisa membuat dan menampilkan laporan keuangan yang jauh lebih dan pastinya sesuai dengan standar akuntansi yang telah berlaku di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis laporan keuangan SD Nurul Huda II Surabaya ditinjau dari PSAK No. 1 (penyajian laporan keuangan), dapat disimpulkan sebagai berikut : Laporan keuangan SD Nurul Huda II Surabaya menyajikan laporan keuangan sesuai aturan dan cara yang telah berlaku di Yayasan Nurul Huda. Yaitu terdiri dari waktu dan komponen pembuatan laporan keuangan. Yang pertama yaitu waktu pembuatan laporan. Waktu pembuatan laporan keuangan SD Nurul Huda II Surabaya dibagi menjadi tiga, yaitu harian, mingguan, dan juga bulanan. Laporan keuangan harian yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dan dilakukan setiap hari. Laporan keuangan mingguan yaitu laporan yang dibuat untuk mengetahui bagaimana saldo akhir dan perkembangan keuangan selama satu minggu. Laporan keuangan bulanan yaitu hasil perhitungan atau penjumlahan laporan keuangan harian dan mingguan, tujuan dari laporan keuangan bulanan adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan keuangan sekolah apakah mengalami surplus atau defisit. Yang kedua yaitu komponen yang ada dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan SD Nurul Huda II dibagi menjadi 2 komponen yaitu pemasukan dan pengeluaran. Dalam setiap komponen baik pemasukan maupun pengeluaran dibagi menjadi beberapa komponen lagi. Pemasukan, terdiri dari iuran kegiatan siswa, iuran qurani siswa, dana bos atau bopda. Yang kedua pengeluaran, terdiri dari pengeluaran SD Nurul Huda II, gaji guru , gaji guru

gurani, gaji guru bimbel, dan juga gaji guru ekstrakurikuler. Penyajian laporan keuangan yang ada di SD Nurul Huda II tidak sesuai dan tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Satuan Akuntansi Indonesia (SAK) yaitu harus berdasarkan PSAK No. 1 (tentang penyajian laporan keuangan). Seperti yang sudah kita ketahui dalam PSAK No. 1 terdapat beberapa komponen yaitu : a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, c. laporan perubahan ekuitas selama periode, d. laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, (ea.) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A, dan f. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut: Bagi lembaga sekolah sebaiknya lebih diperbaiki lagi untuk laporan keuangannya. Mungkin akan terlalu sulit jika harus merubah total laporan keuangan yang sudah digunakan dan diterapkan selama ini. Namun tidak ada salahnya jika sedikit demi sedikit diperbaiki agar menjadi laporan keuangan yang baik dan suatu saat bisa sesuai dengan penyajian laporan yang di terapkan dalam PSAK No.1 (tentang penyajian laporan keuangan). Bagi peneliti, karna peneliti termasuk TU keuangan di SD Nurul Huda II hendaknya benar-benar berusaha untuk memperbaiki laporan keuangannya dengan menerapkan seluruh ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan agar laporan keuangan yang ada di sekolah tersebut bisa menjadi laporan keuangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiamaliahanii, <https://amiamaliahanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaankeuangan-pendidikan/> (diakses 30 November 2018 pukul 14:25)
- blog pendidikan indonesia, <http://inducation.blogspot.com/2008/10/manajeme-keuangan-sekolah.html> (diakses, 30 november 2018 pukul 14:35)
- Dr. Taudlikul Afkar, Johan Wahyu Wicaksono, SE, MEI, dan Ani Faujiah, S.Fil.I, MEI, *Mendesain Akuntasni Anti Korupsi*, (Surabaya: STAINIA Press, 2016).

- Dyckman, Thomas R., Ronald E., Dukes, and Charles J., Davis. 2000. *Akuntansi Intermediate. Edisi Ketiga Jilid II. Terjemahan Herman Wibowo*. Jakarta: Erlangga.
- Financial Accounting Standards Board. 2010. Statement of Financial Accounting Concepts No. 8. Connecticut: Financial Accounting Foundation. Par .OB2
- Hardiwinoto, 2006. STANDAR AKUNTANSI SYARIAH (Paradigma Baru Sistem Akuntansi di Indonesia). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Fakultas Ekonomi Semarang*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. Par. 47
- Kieso, Donald, Jerry Weygandt, dan Terry D., Warfield. 2011. *Intermediate Accounting*. IFRS Edition. Volume 1. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Marshallino Jordy Wantah. (2015). Analisis Penerapan Psak No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Salmonson, R. F., 1969, *Basic Financial Accounting Theory*, Belmont-California: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Siti Hawa dan Siti Khairani. (2013). Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan PT.Jamsostek (Persero). *Jurnal. STIE MDP*.
- Warren, Carl S., James M., Reeve, and Philip E., Fees. 2005. *Pengantar Akuntansi. Edisi 21 Buku Satu. Terjemahan Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.